

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dan problematika penelitian. Sedangkan benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan disebut subjek penelitian. Dengan mengacu kepada definisi tersebut, maka yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok. Data yang di peroleh dan diteliti bersumber dari kuesioner yang dibagi kepada responden yaitu Wajib Pajak.

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1. Jawatan Pajak

Bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.

2. Jawatan Lelang

Bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.

3. Jawatan Akuntan Pajak

Bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan

4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada

Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah kantor bank yang digunakan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan barulah digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang menangani setoran-setoran pajak. Sejalan dengan perkembangan waktu dibentuklah suatu Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Disamping lima Direktorat lainnya seperti :

1. Sekretariat Jenderal Keuangan Republik Indonesia
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Direktorat Anggaran
4. Direktorat Jenderal Moneter
5. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

Dalam perkembangannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok mengalami pergantian nama yaitu : Pertama “Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Utara Dua”. Kedua “Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara Dua” dan yang ketiga adalah “Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok”. Dan yang terakhir “Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok”. Kemudian pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/KMK.01/1994, memandang perlu adanya pemecahan Kantor Pelayanan Pajak disetiap kecamatan sehingga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Dua dipecah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok
2. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok dengan adanya pemecahan ini memiliki kewenangan dua wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Tanjung Priok, meliputi : Sunter Agung, Sunter Jaya, Warakas, Kebon Bawang dan Sungai Bambu.
2. Kecamatan Koja, meliputi : Lagoa, Rawa Badak, Koja Selatan, Koja Utara, Semper.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 443/KMK.01/1999 tanggal 17 Mei 1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok dipecah menjadi dua, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok, lokasinya terletak di Jalan Enggano No. 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sunter Agung, Sunter Jaya, Warakas, Kebon Bawang dan Sungai Bambu.
2. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, lokasinya terletak di Jalan Raya Plumpang Semper No. 10 A, Jakarta Utara, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Koja.

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004, KPP Jakarta Tanjung Priok dan KPP Jakarta Koja berada dibawah Koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta V, yang pada saat ini berubah nama menjadi Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

Dan sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor : 132/KMK.01/2006 tanggal 31 Mei 2006 Jo PMK Nomor :

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

55/KMK.01/2007 kembali Direktorat Jenderal Pajak melakukan reorganisasi, di mana KPP Jakarta Tanjung Priok berubah nama menjadi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan pada bulan Juli 2007 KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok di pecah menjadi dua yakni :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan wilayah kerja Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Warakas.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dengan wilayah kerja Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sungai Bambu yang menggunakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Selain itu pada Bulan April 2007 sebanyak 110 Wajib Pajak pindah ke KPP Madya Jakarta Utara.

1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dari penggalan kalimat visi yang pertama menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ingin menjadi suatu institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya oleh masyarakat memiliki arti yaitu DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

masyarakat, bangsa, dan negara. Modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat mengacu kepada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek penyelenggara sistem tersebut. Peran sumber daya manusia diangkat melalui kata integritas dan profesionalisme, sehingga sistem administrasi perpajakan dimaksud di atas dilaksanakan oleh sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak yang berintegritas dan memiliki profesionalisme tinggi.

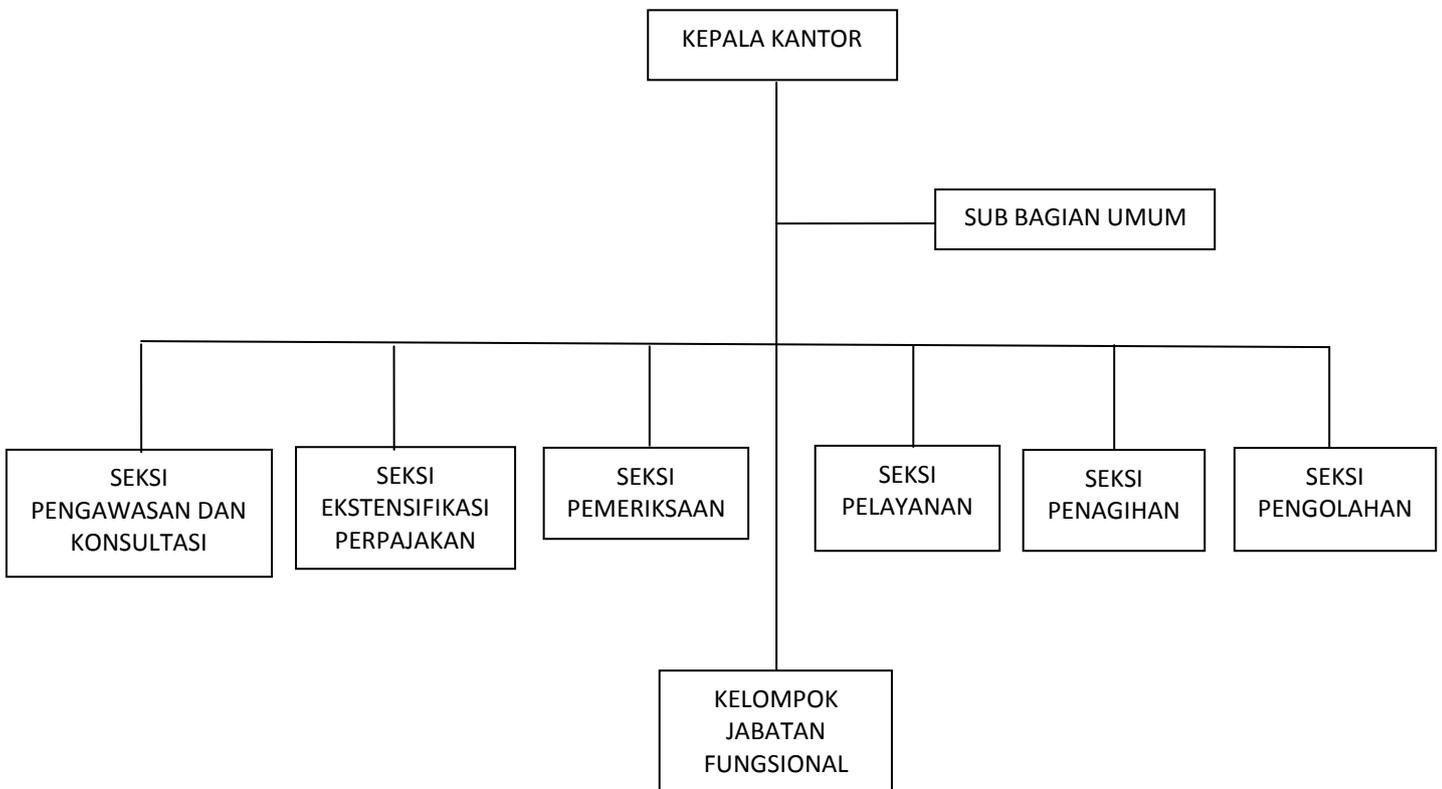
2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006, maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi "Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien".

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran Direktorat Jenderal Pajak tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

3.1.2 Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok

TABEL II
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA TANJUNG PRIOK



Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok

Susunan organisasi KPP Pratama terdiri dari:

1. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman

dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Kelompok Fungsional

Mempunyai tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

3.1.3 Kedudukan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor : 55/PMK.01/2007 Jo PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 31 Mei 2006, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok yang berada di bawah koordinasi Kanwil DJP Jakarta Utara. mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Didalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak
2. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengurangan Pajak Bumi bangunan dan BPHTB
5. Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan
6. Penerbitan surat ketetapan pajak
7. Pembetulan surat ketetapan pajak
8. Pengurangan sanksi pajak
9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan
10. Pelaksanaan Administrasi

3.1.4 Produk yang dihasilkan perusahaan

1. Produk barang
 - Kartu NPWP dan NPPKP
 - Surat Pemberitahuan Pajak Masa Dan Tahunan

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

- Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB
- Surat Ketetapan Pajak
- Surat Keterangan Fiskal

2. Produk jasa

- Pemberian informasi perpajakan
- Penerimaan surat-surat permohonan sari wajib pajak
- Penerimaan pelaporan SPT masa PPh dan PPN
- Penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh
- Pembuatan NPWP dan NPPKP
- Pelayanan PBB dan BPHTB

3.1.5 Masalah yang dihadapi

1. Sarana kerja yang kurang memadai,

Semua Kantor Pelayanan Pajak Pratama saat ini menggunakan suatu sistem *online* yang disebut SIDJP, yaitu suatu sistem yang menggabungkan seluruh aplikasi perpajakan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat tanggal-tanggal sibuk sistem ini sering mengalami *off-line* karena padatnya jaringan yang menggunakan jaringan sistem. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan wajib pajak menjadi lebih lama, selain itu juga kurangnya komputer dan printer juga menambah faktor yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal.

2. Sumber daya manusia yang kurang memadai

Masalah ini meliputi baik dalam hal kualitas maupun kuantitas pegawai. Dalam hal kualitas, pegawai di seksi Pelayanan seharusnya memiliki pengetahuan teknis perpajakan yang baik, hal ini diperlukan karena seksi Pelayanan merupakan tempat wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dan meminta penjelasan tentang perpajakan, sehingga apabila pegawai tidak menguasai teknis perpajakan yang memadai maka proses tersebut akan menjadi terhambat. Selain itu jumlah pegawai di seksi Pelayanan belum sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga setiap pegawai menangani beberapa pekerjaan sekaligus yang berdampak pada kurang optimalnya penyelesaian pekerjaan, termasuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

3.1.6 Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok

Dalam menghadapi masalah yang timbul Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok melakukan beberapa kebijakan antara lain :

1. Untuk masalah kurangnya sarana kerja yang memadai dilakukan perbaikan dan perawatan secara rutin terhadap jaringan komputer internal, serta memberikan usulan perbaikan dan penyempurnaan sistem.
2. Untuk masalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai diatasi dengan menyelenggarakan pelatihan kepada para pegawai tentang teknis perpajakan dan membuat pembagian tugas serta buku panduan manual yang jelas untuk pelaksanaan tugasnya.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratory research atau kausalitas. Penelitian untuk mengetahui apa dan seberapa jauh faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi suatu variabel dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode eksploratory research atau kausalitas. **Mudrajad (2007:12)** mengatakan bahwa penelitian kausalitas adalah penelitian untuk mengetahui apa dan seberapa jauh faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi suatu variabel dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menarik kesimpulan, sedangkan analisis yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis. Untuk itu, ditempuh langkah-langkah yang akan dimulai dari operasional variabel, rancangan pengukuran hipotesis, dan metode pengumpulan data.

Menurut **Nazir (2005:56)** dalam buku **Metodologi Penelitian** mengemukakan bahwa penelitian survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus ataupun dengan menggunakan sampel. Sedangkan menurut Singarimbun (1995:3), penelitian survei adalah penelitian yang

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer berupa isian kuesioner dari pegawai pajak yang berada pada seksi pelayanan, seksi fungsional, dan seksi waskon.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut **Sugiono** dalam buku “Metode Penelitian Bisnis” (2008:59), Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pada judul penelitian yang diungkapkan yaitu : “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak” (Penelitian Deskriptif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok), maka terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah:

1) Variabel independen atau variabel bebas (X)

Variabel independen ialah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor. Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas (X) yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Sub variabel ini adalah:

- a) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak;
- b) Perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak;
- c) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi;
- d) Kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

2) Variabel dependen atau variabel tidak bebas (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau variabel terikat (Y), yaitu Efektivitas Penerimaan Pajak

Sub variabel ini terdiri dari:

- a) Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Berdasarkan indikator diatas, masing-masing variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap pertanyaan diberi nilai dengan menggunakan sistem skor untuk menentukan bobot penelitian. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan dependen yaitu 5 tingkat, bergerak dari 1 sampai dengan 5. Alternatif jawaban adalah sebagai berikut:

Tabel III Pemberian Kode/Skor untuk Alternatif Jawaban

Jawaban Variabel X	Jawaban Variabel Y	Skor
Sangat Baik (SB)	Sangat Setuju (SS)	5
Baik (B)	Setuju (S)	4
Cukup Baik (CB)	Cukup Setuju (CS)	3
Tidak Baik (TB)	Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Baik (STB)	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut didasarkan pada model yang sudah umum digunakan yaitu skala Likert. Karena teknik yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh menjadi suatu urutan data kuantitatif adalah dengan teknik *Summated Rating Method : Likert Scale*. Skala Likert merupakan suatu pengukuran data dengan skala ordinal. Pengukuran skala ini dilakukan dengan cara menetapkan bobot, kemudian menambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah dari masing-masing indikator yang ingin diukur.

Tabel IV Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	No. kuesioner	
X	Modernisasi Perpajakan	Restrukturisasi Organisasi	O R D I N A L	No. 1 - No. 4
		Perubahan Implementasi Pelayanan		No. 5 - No. 8
		Fasilitas Pelayanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi		No. 9 - No. 12
		Kode Etik		No.13 - No.16
				No.17- No.25
Y	Efektivitas Penerimaan Pajak	Optimalisasi Penerimaan Pajak		

3.2.2 Penetapan Hipotesis

Perumusan Ho dan Ha pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : $\beta \leq 0$ Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

Ha : $\beta \geq 0$ Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak.

3.2.3 Penetapan Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Menurut **Sugiono** dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” (2006:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok.

3.2.4 Penetapan Sampel

Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi yang mewakili suatu populasi. Sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena dalam praktek banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi. Kendala tersebut bisa karena situasi, tenaga, biaya dan lain-lain.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic sampling*. Pada metode *systematic sampling* pengacakan hanya dilakukan satu kali diawal penarikan, selanjutnya penarikan dilakukan dengan bilangan kelipatan dari jumlah populasi dibagi jumlah sampel. *Systematic sampling* digunakan pada penelitian ini karena tidak tersedianya kerangka sampling (daftar populasi),

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

sehingga peneliti tidak bisa langsung mendatangi calon responden melainkan menunggu di Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Tanjung Priok. Melalui rumus dapat dihitung jumlah sampel minimum sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

N = Jumlah populasi

e = nilai kritis / batas ketelitian yang diinginkan Dalam hal ini nilai kritis yang digunakan 0,1

n = Jumlah sampel

Jadi jumlah sampel penelitian (n) yaitu sebanyak 30 Pegawai Pajak.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu *indirect research* untuk mendapatkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan. *Direct research* untuk mendapatkan data-data primer melalui studi lapangan.

Teknik dan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

dalam menganalisis masalah yang diteliti, serta sebagai data pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori guna mendukung data primer.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian lapangan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjek yang diperoleh dari penelitian lapangan. Untuk memperoleh data primer dari objek penelitian adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, hasil observasi, kejadian atau kegiatan (Supomo 2002). Pada tahap awal, penelitian dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok , untuk mencari data-data tentang KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan Penerimaan Pajak. Tahap selanjutnya, adalah menyebarkan kuesioner kepada Pegawai Pajak sebagai responden.

3.2.6 Pengujian Instrumen

Data memiliki kedudukan yang sangat penting karena menggambarkan variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, berat tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya instrumen data. Kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 1985:155).

3.2.6.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Semakin

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin mendekati atau mengenai sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tes tersebut menjalankan fungsi pengukurannya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes atau penelitian tersebut.

Uji validitas bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur atribut yang dimaksud. Dengan menggunakan prosedur seleksi item dengan cara menguji karakteristik masing-masing item yang menjadi bagian tes yang bersangkutan. Item-item yang tidak memenuhi syarat kualitas, tidak dapat diikutsertakan menjadi bagian dari tes.

Langkah-langkah uji validitas dirinci sebagai berikut:

- 1) Hitung skor indikator dari masing-masing item tersebut.
- 2) Hitung koefisien korelasi skor item pernyataan dengan skor indikatornya menurut metode *Product Moment Pearson*. Masing-masing item pernyataan harus disesuaikan dengan indikatornya masing-masing. Rumus *Product Moment Pearson* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien korelasi *product moment pearson*

X = jumlah skor untuk indikator x

Y = jumlah skor total indikator y

N = banyak responden (sample) dari variabel x dan y dari hasil kuesioner.

3.2.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Reliabilitas mencakup tiga aspek penting, yaitu alat ukur yang digunakan harus stabil, dapat diandalkan (*dependability*) dan dapat diramalkan (*predictability*) sehingga dengan alat ukur tersebut reliabilitas menjadi tinggi dan dapat dipercaya (Nazir, 2005). Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana hasil pengukuran terbebas dari kesalahan pengukuran (*measurement error*).

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan *internal consistency*, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis. Teknik yang digunakan adalah teknik koefisien *Cronbach's Alpha* merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \alpha_i^2}{\alpha_t^2} \right]$$

Keterangan:

α = koefisien reabilitas instrument

r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel

k = jumlah variabel

Dengan metode *internal consistency* ini, semakin tinggi koefisien alpha, maka kuesioner semakin reliabel. Kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya butir pernyataan didasarkan pada nilai kritis yaitu 0,30. Bilamana koefisien validitas butir pernyataan yang sedang diuji lebih besar atau sama dengan 0,30 maka disimpulkan butir pernyataan tersebut valid. Untuk reliabilitas ditetapkan batas nilai 0,70 sebagai batas terendah kuesioner bisa diterima.

Tabel V Standar Penilaian Koefisien Validitas dan Reliabilitas

Criteria	Reliability	Validity
Good	0,80	0,50
Acceptable	0,70	0,30
Marginal	0,60	0,20
Poor	0,50	0,10

Sumber: Barker et al, 2002; 70

3.2.7 Transpormasi Data

Pembuatan skala merupakan suatu prosedur pemberian angka-angka atau simbol-simbol lain kepada sejumlah ciri objek-objek dengan maksud untuk menyatakan karakteristik angka-angka pada ciri-ciri tersebut. Konsep-konsep dibidang penelitian ini sering rumit dan abstrak, diperlukan peralatan pengukuran yang valid, sementara yang diperoleh adalah sesuatu antara skor sebenarnya dan skor tes. Pengskalaan dapat membantu mengukur konsep-konsep abstrak secara lebih

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

cermat, terutama pada masalah pengukuran sikap dan pendapat. Dalam penelitian ini sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrument penelitian yang pada awalnya merupakan data ordinal, akan diubah terlebih dahulu menjadi data interval.

Proses transformasi data dari skala ordinal menjadi skala interval sering dijumpai ketika melakukan analisis data terutama pada penelitian sosial. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Successive Interval*. Metode *Successive Interval* dapat menghasilkan dua hal yang berbeda yakni batas penskalaan atau skala baru bagi setiap kategori. Batas penskalaan berguna untuk melihat posisi relatif variabel terhadap kategori. Langkah-langkah penskalaan kategori dengan menggunakan metode *successive Interval* adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pertanyaan dilakukan penghitungan frekuensi setiap pilihan jawaban.
2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh setiap pertanyaan, dilakukan penghitungan proporsi setiap pilihan jawaban.
3. Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pertanyaan dilakukan penghitungan kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
4. Untuk setiap pernyataan, tentukan nilai batas (*boundary value*) untuk setiap nilai Z untuk setiap pilihan jawaban.
5. Hitung *Scale Value* (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dimana : Density of lower limit = Kepadatan batas bawah

Density of upper limit = Kepadatan batas atas

Area below upper limit = Daerah di bawah batas atas

Area below lower limit = Daerah dibawah batas bawah

6. Hitung Score (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$\text{Score} = \text{scale value} | \text{scale value minimum} | + 1$$

3.2.8 Pemilihan Tes Statistik

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian diatas maka penelitian menggunakan Analisis Regresi dan Korelasi Sederhana karena penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Karena hasil skoring jawaban responden pada kedua variabel penelitian masih merupakan data ordinal maka agar data dapat diolah menggunakan analisis regresi terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval menggunakan *method of succesive interval*.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (Y) dengan satu atau lebih variabel independen (X), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati,1995:16 dalam Imam Ghozali)

Langkah-langkah perhitungan adalah analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi untuk mengetahui hubungan variabel terikat terhadap variabel bebas. Selanjutnya diuji seberapa jauh pengaruh antar variabel-variabel tersebut dengan uji t.

3.2.8.1 Analisis Regresi dan Korelasi Sederhana (Analisis Regresi, Korelasi, Determinasi)

1) Analisis Regresi

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari persamaan tersebut dapat mengetahui besarnya kontribusi variabel *X* (*independent*) terhadap variabel *Y* (*dependent*). Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

- Y** = Variabel nilai kepuasan Wajib Pajak
- A** = Nilai konstanta, yaitu besarnya Y apabila $X = 0$ (nol)
- b** = Koefisien arah regresi yang menyatakan besarnya perubahan nilai apabila terjadi perubahan nilai X sebesar satu satuan unit
- X** = Variabel Modernisasi administrasi perpajakan

2) Analisis Korelasi

Korelasi dan regresi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, untuk mencari koefisien korelasi digunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson*. Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan dua variabel dan membuktikan hipotesis, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari kedua variabel atau lebih adalah sama. Perhitungan koefisien korelasi dapat dilakukan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

r_{xy} = Korelasi antara variabel X dan Y

X = Jumlah variabel X

Y = Jumlah variabel Y

Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yang dihasilkan digunakan tabel interpretasi sebagai berikut:

Tabel VI Derajat Tingkat Hubungan Antar Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2008:214)

3) Koefisien Determinasi

Apabila koefisien korelasi sudah diketahui, selanjutnya ditentukan besarnya

koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh dalam persentase dari variabel X dan variabel Y. Perhitungan koefisien determinasi dapat dilakukan sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

Dimana:

KD = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

3.2.8.2 Pengujian Persamaan Regresi Berdasarkan Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Setelah hasil regresi diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengevaluasi kealayaan hasil regresi., yaitu :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov- Smirnov* dalam program SPSS.

Menurut **Singgih Santoso** "*Mengolah Data Statistik Secara Profesional*" (2002;393), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model adalah normal.

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka model tidak berdistribusi secara normal

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode grafik normal

Probability Plots dalam program SPSS.

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.2.9 Pengujian Hipotesis (Uji t, Penetapan Tingkat Signifikansi)

1) Uji t

Uji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini menggunakan uji 2 pihak . Uji t pada dasarnya untuk memustuskan apakah ada pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat, yaitu dengan membandingkan dan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$t = (\bar{X} - \bar{Y}) \sqrt{\frac{n(n-1)}{\sum_{i=1}^n (\hat{X}_i - \hat{Y}_i)^2}}$$

Dimana:

X	=	Jumlah responden
Y	=	Koefisien korelasi Pearson
t	=	Nilai signifikansi

Selanjutnya t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf nyata 0.05 dengan kriteria

keputusan sebagai berikut:

Ho diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Bila Ho diterima, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan, dan jika Ho ditolak artinya pengaruhnya signifikan. Signifikan artinya adalah hasil penelitian tersebut dapat diberlakukan pada seluruh populasi dimana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi. Perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.

2) Penetapan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi (*Level of Significant*) yang dipilih adalah 95%. Angka ini merupakan tingkat signifikansi yang umum dipakai dan dinilai tepat untuk penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup kuat mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Artinya Ho benar maka probabilitas melakukan kesalahan menolak hipotesis adalah sebesar 0.05.

3.2.10 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan terdapat dasar untuk penarikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis selanjutnya akan mencoba memberikan pandangan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak pada umumnya, bagi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok khususnya maupun peneliti selanjutnya.